

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya dalam penerapan prinsip-prinsip *good government governance* adalah meningkatkan akuntabilitas. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, Salah satu jenis akuntabilitas yang perlu diperhatikan adalah akuntabilitas keuangan. Pembuatan laporan keuangan adalah suatu kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Rachmawati, 2014) dalam Baiq Dwi Apryana Eristanti, dkk (2018).

Upaya realita dilakukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai yang artinya bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005) dalam Ayu Priska Megayanti, dkk (2015).

Agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat memberi manfaat bagi para pihak yang berkepentingan, maka laporan keuangan harus berkualitas dan telah memenuhi karakteristik kualitatif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diungkapkan bahwa, karakteristik kualitatif

laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif antara lain: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, (4) dapat dipahami.

Mengacu pada uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa LKPD yang berkualitas merupakan syarat dan suatu keharusan yang dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan dalam pembuatan keputusan. Dengan demikian bagi Pemerintah Daerah menjadi kewajiban dan kebutuhan bahwa LKPD yang disusunnya memenuhi kriteria berkualitas. Untuk memenuhi karakteristik kualitatif maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Bowo, 2009).

Salah satu indikator yang merefleksikan kualitas laporan keuangan Pemerintah adalah opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan. Opini dari BPK-RI memiliki strata/tingkatan tertinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kemudian tingkatan berikutnya adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2016, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dimana investasi permanen belum didukung dengan laporan keuangan audited, pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya memadai (BPK RI, 2016). Sedangkan Tahun 2020, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Walau sudah memperoleh opini WTP, laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang masih

terdapat catatan dari BPK, diantaranya kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal dan penatausahaan asset sisa tahun sebelumnya yang belum tertib (pelopor9, 2021). Beberapa permasalahan terkait kewajaran penyajian laporan, dimana hal ini disebabkan oleh 1) penyajian laporan keuangan yang sepenuhnya belum sesuai dengan SAP, (2) lemahnya sistem pengendalian intern, (3) belum tertatanya Barang milik negara/daerah secara tertib, (4) pengadaan barang yang belum mengikuti ketentuan yang berlaku, dan (5) kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan yang belum memadai. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersaji pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2016-2020

No	Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kota Kupang	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
2.	Kabupaten Kupang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
3.	TTS	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
4.	TTU	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
5.	Belu	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
6.	Alor	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
7.	Lembata	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
8.	Flores Timur	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
9.	Sikka	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10.	Ende	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
11.	Nagekeo	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
12.	Ngada	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
13.	Manggarai Timur	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
14.	Manggarai	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
15.	Manggarai Barat	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
16.	Sumba Barat Daya	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
17.	Sumba Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
18.	Sumba Tengah	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
19.	Sumba Timur	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20.	Sabu Raijua	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
21.	Rote Ndao	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
22.	Malaka	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

Sumber data: Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa pemerintah Kota Kupang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018, yang berarti adanya penurunan akuntabilitas dan transparansi penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, akan tetapi di tahun anggaran selanjutnya mengalami peningkatan opini yaitu untuk tahun 2019 dan 2020 meningkat menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peningkatan tersebut didukung oleh upaya-upaya pemerintah daerah (pemda) melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada tahun sebelumnya, melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) serta penerapan software sistem informasi akuntansi (SIA) dan peningkatan kompetensi aparatur dan penerapan SPI.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaporan keuangan berbasis akrual belum sepenuhnya efektif, karena masih ada permasalahan terkait dengan kebijakan, adopsi teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Pemerintah daerah belum memiliki strategi yang komprehensif, tidak merencanakan kebutuhan kompetensi, tidak merencanakan kebutuhan pelatihan sumber daya manusia, sistem aplikasi yang digunakan belum sepenuhnya dapat menghasilkan laporan keuangan yang valid, akurat, dan sesuai dengan SAP berbasis akrual, dan belum memiliki regulasi yang selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 (BPK RI, 2015).

Selain sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi juga memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan terutama keterandalan dan ketepatanwaktuan. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 disebutkan

bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Selain wajib untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang memadai juga sangat diperlukan. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penulis mengambil pemilihan lokasi penelitian pada pemerintah daerah Kota Kupang karena selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan tingkat opini laporan keuangan daerah yang diberikan oleh BPK. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada pemerintah daerah Kota Kupang belum memadai yang disebabkan karena lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan belum memadainya kompetensi sumber daya manusia. Selain itu belum menginternalisasi perencanaan implementasi SAP berbasis akrual dan terdapat regulasi dan kebijakan SAP berbasis

akrual yang belum selaras dengan peraturan lainnya (Ambar, 2014) dalam Aprindo Sintanala Kaisar (2017).

Yuyun (2018) dalam Siti Qomah,dkk (2021) menyatakan bahwa laporan yang berkualitas dilihat dari penerapan standar akuntansi yang baik, sistem pengendalian internal dari atasan yang terkendali, juga kompetensi sumber daya manusia, sehingga apabila disuatu pemerintah ketersediaan kompetensi yang masih terbatas tentu akan mempengaruhi baik atau buruknya laporan keuangan. Penerapan standar pengelolaan keuangan harus ada suatu panduan atau pedoman dalam penyusunannya dan adanya pengendalian dari atasan atau pimpinan dengan kata lain perlu adanya sistem pengendalian intern. Faktor lain yang dapat membuat baik buruknya informasi laporan keuangan seperti kemajuan teknologi, dengan memanfaatkan teknologi dengan baik dalam suatu pemerintah daerah akan menjadikan pemerintahan lebih baik.

Aspek teknologi informasi untuk mendukung penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Kupang sangat memadai dan telah dilaksanakan dengan baik, dimana dalam pengelolaan keuangan berbasis komputer memang telah digunakan oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini PPK SKPD. Aplikasi pengelolaan keuangan yang sudah dimiliki antara lain aplikasi gaji, aplikasi Sistem Pengelolaan Barang Daerah (SIMBADA). Namun pengelolaan keuangan belum diintegrasikan secara online antara SKPD dengan Bidang Akuntansi di Badan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan yang sudah online adalah penyusunan anggaran sedangkan penginputan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), aplikasi pencatatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih dilakukan secara manual.

Teknologi informasi dapat membantu memudahkan pelaksanaan tugas atau pekerjaan organisasi. Menurut Martin et,al, (2002) dalam Basalamah (2007), teknologi

informasi didefinisikan sebagai *hardware* dan *software* komputer untuk memproses dan menyimpan data serta teknologi komunikasi untuk memindahkan data. Dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan teknologi informasi diperlukan data-data transaksi yang belum terorganisir tetapi dapat diorganisasikan atau sering diartikan data yang masih mentah. Sedangkan komputer merupakan alat untuk mengubah informasi yang masih mentah (data transaksi) menjadi informasi yang berguna yang sesuai dengan tujuannya dalam hal ini adalah laporan keuangan.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah tentang Informasi Keuangan Daerah yang menggantikan PP Nomor 11 Tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah. Sedangkan menurut Widjajanto (2001) dalam Riedy Riandani (2017) secara umum manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan data-data transaksi yang dari tahun ke tahun semakin besar serta kualitas data yang kian semakin kompleks dan rumit dikarenakan semakin meningkatnya total volume APBN/D dari tahun ke tahun. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar, semakin kompleks dan rumit.

Aspek sistem pengendalian intern dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga belum baik. Hasil reuiu oleh Inspektorat Kota Kupang terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kupang Tahun 2016-2020 dan LHP BPK RI 2016-2020 menemukan a). Bendahara Umum Daerah (BUD) belum secara rutin menyusun Buku Pembantu Bank, tidak melakukan rekonsiliasi Kas Daerah, tidak menerapkan Sistem *Treasury Single Account (TSA)* dalam pengelolaan Kas Daerah; pengelolaan dan penatusahaan hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) oleh BUD tidak

sesuai kode rekening, dan belum melakukan rekonsiliasi PFK. b). Bendahara Pengeluaran tidak mengerjakan buku bantu panjar, buku bantu bank dan buku kas tunai, dalam mempertanggungjawabkan belanja kepada BUD tidak disertai dengan Surat Permintaan Pembayaran dan faktur pajak, pertanggungjawaban belanja melalui Surat Permintaan Pembayaran Dana Ganti Uang (SP2D-GU) tidak sesuai realisasi belanja, Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah tidak berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dalam mempertanggungjawabkan belanja sekolah, terlambat menyetorkan pajak ke kas Negara dan pertanggungjawaban akhir tahun SP2D Nihil, SP2D GU dan SP2D TU tidak tertib. c). Tidak melakukan pencatatan persediaan, saldo fisik barang tidak sesuai dengan Berita Acara *Stock Opname* persediaan dan terdapat barang persediaan yang belum dicatat; d). Piutang pajak belum dicatat berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dan tidak menerapkan pengklasifikasian piutang berdasarkan umur piutang; e). Belum melakukan rekonsiliasi aset tetap, melakukan pengamanan hukum dan fisik terhadap aset tetap dan belum melakukan penghapusan aset tetap yang rusak; f). Terdapat kesalahan penganggaran belanja modal dan belanja barang; g). Terdapat kesalahan pencatatan realisasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sehingga juga berpengaruh terhadap jumlah saldo kas di Bendahara Pengeluaran. Terkait dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI memberikan catatan terhadap akun-akun yang bermasalah yakni, Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, piutang Pajak, investasi Permanen, Investasi Non Permanen, Aset Tetap dan Belanja Barang dan Jasa.

Menurut Zeyn (2011) dalam Puspitawati (2016). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) oleh Pemerintah Daerah akan menghasilkan laporan keuangan yang

berkualitas dan mengandung informasi yang berguna. Standar Akuntansi Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya beberapa hal berikut (1) Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, (2) Keandalan dalam Laporan Keuangan. (3) Pengamanan aset Negara, dan (4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumberdaya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian adanya kesalahan dan penyalahgunaan terutama dalam penyusunan laporan keuangan. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal,serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Aspek kompetensi Sumber Daya Manusia, ditemukan bahwa latar belakang pengetahuan pengelola keuangan Pemerintah Kota Kupang khususnya Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan pejabat/PNS

pada Bidang Akuntansi dan Aset sangat bervariasi. Berdasarkan data yang diperoleh pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang bahwa dari 39 orang PPK-SKPD dan 25 Pejabat/PNS pada Bidang Akuntansi dan Aset, dapat disajikan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Latar Belakang Pendidikan PPK-SKPD dan Pejabat/PNS Bidang Keuangan dan Aset Badan Keuangan Daerah Kota Kupang

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
Sarjana Ekonomi	22 orang	34,78%
Sarjana Sosial	13 orang	20,31%
Sarjana Hukum	11 orang	20,31%
Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
gelar kesarjanaannya lainnya	14 orang	21,88%
SMA	2 orang	3,13%

sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Kupang

Seharusnya aspek sumber daya manusia pengelola keuangan ini adalah haruslah orang yang tepat dan sesuai dengan latar belakang pendidikannya yaitu Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi.

Terkait dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) selama Tahun 2016 sampai Tahun 2020, Pemerintah Kota Kupang setiap tahun selalu menyelenggarakan diklat tentang pengelolaan keuangan yang diikuti oleh semua PPK-SKPD. Pada Tahun 2016-2020 Pemerintah Kota Kupang menyelenggarakan diklat paket regulasi pengelolaan keuangan yang diikuti 34 orang PPK-SKPD dan pada Tahun 2017 dilaksanakan diklat yang sama diikuti oleh PPK-SKPD sebanyak 38 orang. Sedangkan Pejabat/PNS pada Bidang Akuntansi dan Aset Badan Keuangan dan Aset hanya 5 orang yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan.

Simanjuntak (2005) dalam Puspitawati (2016), menyatakan SDM merupakan faktor penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah adalah manusia. SKPD harus memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang

didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan agar pengelolaan keuangan daerah menjadi baik, dan diukur dari pengetahuan, keterampilan dan perilaku Sumber Daya Manusia yang bersangkutan.

Berbagai penelitian yang pernah dilakukan tentang kualitas laporan keuangan memberikan hasil yang berbeda antara berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian oleh Desi Puspitawati (2016) dengan tujuan menganalisis pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung menunjukkan hasil kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD di Provinsi Lampung. Sedangkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Lampung.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Blasius Oban (2017) tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2012-2016 menyimpulkan bahwa variabel Sumber Daya Manusia, teknologi informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sangat berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Penelitian oleh Ikan Murapi (2016), tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lombok Tengah. Hasil pengujian hipotesis adalah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, tetapi tidak dipengaruhi oleh kompetensi Sumber Daya Manusia. Sedangkan penelitian oleh Siska Maydiyanti, dkk (2020), tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, menyimpulkan bahwa variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian oleh Emilda Nur Safiri dan Pingky Dezar Zulkarnain (2020) tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berbagai hasil penelitian diatas menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia menurut penelitian Desi Puspitawati (2016) dan Blasius Oban (2017) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, sementara penelitian Ikang Murapi (2016), Emilda Nur Safiri dan Pingky Dezar Zulkarnain (2020) dan Siska Maydiyanti, dkk (2020), menunjukkan hasil yang berbeda yakni faktor Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Variabel peran teknologi informasi (TI) menurut penelitian Desi Puspitawati (2016) dan Siska Maydiyanti, dkk (2020), menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan hasil penelitian Blasius Oban (2017), Ikang Murapi (2016), Emilda Nur Safiri dan Pingky Dezar Zulkarnain (2020) variabel Teknologi Informasi (TI) berpengaruh positif terhadap peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut penelitian Desi Puspitawati (2016), Blasius Oban (2017), Ikang Murapi (2016) dan Siska Maydiyanti, dkk (2020). Faktor pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan dalam penelitian Emilda Nur Safiri dan Pingky Dezar Zulkarnain (2020) menunjukkan hasil yang berbeda dimana faktor faktor Sistem Pengendalian Internal (SPIP) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah.

Penelitian Desi Puspitawati (2016) tentang “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berbeda

dengan penelitian oleh Blasius Oban (2017), Ikang Murapi (2016), dan Siska Maydiyanti, dkk (2020) menunjukkan variabel penerapan standar akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan dalam penelitian Emilda Nur Safiri dan Pingky Dezar Zulkarnain (2020) tidak menetapkan faktor penerapan standar akuntansi sebagai salah satu variabel penelitiannya. Disini terlihat bahwa jumlah variabel penelitian Emilda Nur Safiri dan Pingky Dezar Zulkarnain lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian Desi Puspitawati.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya disebabkan faktor kontingensi berupa variabel yang digunakan dan responden. Penelitian ini dimotivasi oleh hasil penelitian Simanjuntak (2005) dalam Puspitawati (2016), dimana Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Teknologi Informasi adalah manusia, dengan pertautan antar variabel yang bersifat interaksi, menambah variabel intervening.

Untuk merekonsiliasi hasil penelitian yang tidak konsisten, dapat dilakukan pendekatan kontingensi dan mengevaluasi faktor-faktor kondisional lain seperti variabel intervening. Menurut Tuckman (dalam Sugiyono,2007) mendefinisikan variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela antara variabel independen dengan variabel dependen sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen.

Penelitian ini mempertimbangkan faktor kontingensi variabel intervening berupa kompetensi Sumber Daya Manusia, untuk mengetahui Sumber Daya Manusia berkualitas sebagai faktor berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan agar pengelolaan keuangan daerah menjadi baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang merupakan replikasi dari penelitian Blasius Oban (2017). Perbedaan penelitian Blasius Oban (2017) dengan penelitian ini adalah penelitian ini menjadikan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai variabel intervening dengan harapan agar penelitian ini lebih luas cakupannya dan berdasarkan fenomena dan *research gap* di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kota Kupang).**

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pendapat responden tentang pemanfaatan teknologi informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintah, kompetensi Sumber Daya Manusia, dan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang?

3. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang?
4. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang?
5. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang ?
6. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia memediasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang pemanfaatan teknologi informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintah, kompetensi Sumber Daya Manusia dan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang.
3. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang.
4. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang.
5. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang.

6. Untuk mengetahui apakah variabel kompetensi Sumber Daya Manusia memediasi pengaruh variabel pemanfaatan teknologi informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

Rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan sumbangan pemikiran bagi terciptanya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan praktis kepada para pengelola keuangan Pemerintah Kota Kupang untuk dapat menerapkan manajemen yang baik dalam pengelolaan keuangan demi tercapainya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang.